Politik Kekerasan Taliban Di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif Weberian

(The Taliban Politics Of Violence In Afghanistan: A Weberian Historical-Sosiological Perspektive)

Imam Mawardi¹

¹Universitas Islam Negeri Walisongo imam mawardi 2004036003@walisongo.ac.id

Lutfirahman²

²Universitas Islam Negeri Walisongo lutfirahman@walisongo.ac.id

Umi Nur Idayanti³

³Universitas Islam Negeri Walisongo

Diterima: 6 November 2022 Disetujui: 21 Desember 2022 Dipublikasikan: 22 Desember 2022

Abstract

This jurnal article describes the politics behind the violence in the name of religion used by Taliban in Afghanistan. By uncovering the case, researchers have tried to reveal the legitimacy of the views of such violence in the name of religion. The study is a qualitative research through a literature review with a historical-sosiological approach by the lens of Max Weber's theory which looks at the existence of violence within a religious discourse. By analyzing the extent of the Taliban movement's level in mobilizing people to commit acts of violence, this study emphasizes a historical analysis, i.e, collecting data on the lives of the Afghan people in order to reveal the actual facts. It finds that the politics of violence is used as a guideline for their act of war and revolution i.e., the Taliban jihad in Afghanistan. In terms of jihad in defense of religion, they misinterpret violence in the name of religion. Such violence occurs since there is a lack of central religious authority and is misused for the political benefit/interest of groups on individuals.

Keyword: Afghanistan, Jihad, Max Weber, Religious violence, Taliban

Abstrak

Artikel jurnal ini memaparkan politik di balik kekerasan atas nama agama yang digunakan oleh Taliban dan Afghanistan. Dengan mengungkap peristiwa ini, peneliti mencoba untuk menguak legitimasi pandangan tentang kekerasan atas nama agama dan juga terdapat segi Kepolitikan di Afghanistan mulai berubah setelah Amerika Serikat gagal mendapatkan kesepakatan dan dukungan dari Taliban. Amerika Serikat setiap harinya diharuskan untuk mengimpor minyak sebesar 18,8 juta barrel Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan historis-sosiologis dengan lensa teori Max Weber yang melihat adanya kekerasan dalam wacana keagamaan. Dengan menganalisis sejauh mana tingkat gerakan Taliban dalam memobilisasi orang untuk melakukan tindakan kekerasan, penelitian ini menekankan pada analisis historis, yaitu mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat Afghanistan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Penelitian ini mengungkap bahwa politik kekerasan digunakan sebagai pedoman untuk tindakan perang dan revolusi mereaka

yaitu jihad Taliban di Afghanistan. Dalam hal jihad membela agama, mereka salah mengartikan kekerasan atas nama agama. Kekerasan tersebut terjadi karena kurangnya otoritas keagamaan pusat dan disalahgunakan untuk kepentingan politik/kepentingan kelompok atau individu.

Kata kunci: Afghanistan, Jihad, Kekerasan agama, Max Weber, Taliban

A. PENDAHULUAN

Gerakan nasionalis Islam Taliban yang menganut aliran Sunni merupakan salah satu kelompok yang pernah menguasai Afghanistan setelah Uni Soviet. Gerakan ini kerap menjadi topik perbincangkan baik di masyarakat maupun media massa. Kelompok yang didirikan oleh Mullah Muhammad Omar pada tahun 1994 ini, tergabung dengan beberapa murid dari suku Pashtun yang prihatin melihat ketidakstabilan kondisi pemerintahan Afghanistan pada saat itu (1994). Sampai tahun 2001, Meski hanya mendapatkan pengakuan dari tiga negara, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan kelompok ini dapat melanggengkan eksistensinya dalam kurun waktu yang cukup lama.¹

Dilihat dari istilah kebahasaannya, Taliban bermakna murid-murid atau pelajar. Adalah sebuah kata dari bahasa Pashtun yang merupakan daerah tempat berdirinya kelompok tersebut. Taliban dikenal sebagai kelompok Islam yang kaku dan keras dalam menyebarkan dan mengimplementasikan ajaran agama Islam. Terbukti dengan banyaknya konflik dan kerusuhan yang disebabkan oleh Taliban, salah satunya adalah konflik dengan Amerika Serikat. Sejak awal berdirinya, mereka juga disinyalir memiliki keinginan kuat untuk menguasai Afghanistan, sehingga masyarakat di daerah tersebut merasa khawatir akan kurangnya rasa kemanusiaan. Taliban sebagai kelompok Islam yang berhaluan keras sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai profetik Nabi Muhammad sebagai pengejawantahan Islam yang damai, sehingga mereka digolongkan sebagai kelompok Islam radikal. Lahirnya kelompok Taliban ini diakibatkan adanya faktor persaingan panggung kekuasaan pemerintahan yang merupakan salah satu unsur politik di Afghanistan setelah kemunduran Uni Soviet dari Afghanistan.

Pada Tahun 1978, terjadi sebuah peristiwa invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Kehadiran Uni Soviet adalah bentuk usaha keinginannya merebut kekuasaan pemerintahan Afghanistan yang berpedoman sebagai kaum komunis. Dalam periode tersebut terjadi sebuah perebutan kekuasaan di Afghanistan yang dicampuradukkan dengan adanya suasana perang dingin. Sehingga jumlah kelompok pasukan Afghanistan akhirnya mendapat dorongan dari Amerika Serikat dan Pakistan.

-

¹ Durrotun Nafisah, 'Afghanistan di bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), p. 49.

Hingga pada akhirnya terjadi perang saudara, yaitu perang perebutan kekuasaan dan wilayah antar etnis kaum yang pro dan yang kontra kepada Taliban setelah kemunduran Uni Soviet dari Afghanistan. Sehingga bertepatan tahun 1994 berdirilah sebuah kelompok pro-Islam bernama Taliban. Pada awal berdirinya, kelompok ini hanya beranggotakan orang-orang –kebanyakan murid/pelajar— Suku Pashtun yang merupakan salah satu suku terbesar di Afghanistan kala itu.²

Gerakan tersebut mempermudah dalam memperbaiki wilayah selatan di Afghanistan yang dipimpin oleh mujahidin sebagai salah satu komandan perang. Salah satu tokoh ahli dalam bidang politik asal Kabul, Afghanistan, Amin Saikal (1999) berpendapat bahwasannya:

"Gerakan Taliban adalah salah satu bentuk kekuatan gerakan baru yang memiliki hasil dalam menguasai dan mengontrol kota kedua yang berada di kawasan Afghanistan. Pada tahun 1997 tersebut, perempuan diperlakukan secara ketidakmanusiaan sehingga merasa tertindas dan dianggap lemah tidak bisa melakukan sesuatu hal. Oleh karena itu, Taliban memberikan larangan kepada para perempuan dalam menjalankan pendidikannya serta dilarang dalam merintis pekerjaan yang dilakukan diluar rumah. Terdapat salahsatu perempuan yang merupakan bagian dari kelompok Pashtun yang bernama Malala Yousafzai mengatakan "Sebenarnya membunuh perempuan itu dilarang dalam prinsip masyarakat Pashtun, oleh karenanya masyarakat sangat kaget terkait adanya peristiwa tersebut."

Yang sering diperbicangkan kaitannya dengan Taliban adalah kekerasan atas nama agama dan perebutan kekuasaan, tapi ternyata faktor yang mendasari berdirinya Taliban tidak dipengaruhi itu saja, melainkan adanya faktor politik. Adalah salah satu faktor politiknya, terlihat ketika Amerika dan negara-negara punya kepentingan nasional melakukan serangan balasan terhadap penyerangan Afghanistan di *World Trade Center* (WTC), New York.

Sebelum tanggal 4 Januari 1995, sebanyak 12 provinsi yang ada di Afghanistan telah berhasil dikuasai oleh kelompok Taliban. Prosesya ini dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya pada saat itu kelompok Taliban dipercayai mampu mengurangi maraknya kasus korupsi, penertiban pelanggaran hukum, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta menstabilkan pemerintahan Afghanistan yang pada saat itu menjadi akar konflik. Hingga pada akhirnya Taliban berhaluan dan mengubah visi politiknya sebagai kekuatan untuk melakukan misi jihad –menurut penafsiran mereka. Taliban ingin melakukan *rearrangement* (baca: menata ulang) hukum dan undang-undang di Afghanistan. Yang dimaksud penataan ulang hukum di

² William Malley (ed.), 'Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan', (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999).

³ Ibid.

sana yakni mengubah hukum asal di Afghanistan dan menjadikannya sebagai negara Islam — menerapkan syariat Islam di Afghanistan sebagai undang-undang negara. Agar dapat menjalankan visi dan misi politik tersebut dengan baik, maka kelompok Taliban menggunakan dua cara dengan menggunakan kekuatan besar utama di Afghanistan yaitu, Presiden Rabbani dan Hikmatyar beserta para pasukannya masing-masing⁴.

Sebelum melakukan peneltian, penulis terlebih dahulu telah melakukan telaah pada penelitian-penelitian terdahulu (*library research*) agar tidak terjadi kesamaan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya. Menurut penelitian terdahulu, ditemukan pada Skripsi yang berjudul '*Afghanistan di bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M*' karya Durrotun Nafisah, Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) ditemukan pembahasan, bahwasannya perang Taliban di Afghanistan yang berganti nama menjadi *Imarah* Islam Afghanistan.⁵ Yang mana Imarah Islam Afghanistan sendiri adalah gerakan yang melindungi nilai-nilai serta kepentingan Afghanistan dengan membebaskannya dari penjajahan, teror, korupsi, penjagaan keamanan tanpa meminta bantuan dari dominasi-dominasi kekuatan kelompok luar.⁶

Usai meguasai Afghanistan. Taliban mengkontruksi ulang hukum tersebut dengan dasar syariat Islam versi mereka –dalam artian syariah Islam menurut penafsiran tokoh, pimpinan kelompok Taliban. Kelompok militan Islam tersebut menganggap gerakannya adalah sebagai pembaharuan negara Islam. Dan kemudian Taliban terbukti memiliki keterlibatan denagan atau sebagai gerakan teroris. Hingga pada akhirnya peraturan-peraturan yang telah ditegakkan oleh Taliban tidak disukai bahkan ditolak oleh warga Afghanistan dan bahkan juga dikecam oleh dunia karena terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas pemberlakuan kesewenang-wenangan hukum yang diterapkan.

Juga terdapat dalam jurnal yang berjudul 'Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Taliban di Afghanistan (1996-2001)' yang ditulis oleh Ali Ma'ruf dan M. Nur Rokhman, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang membahas bahwasannya pemeritahan Taliban menerapkan sebuah kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan pembacaan penafsiran dan pengimplementasian syariat Islam versi Taliban dengan cara pembatasan terhadap wanita Afghanistan sepertihalnya: larangan terhadap wanita Afghanistan untuk bekerja dan menempuh pendidikan. Serta terdapat sebuah keputusan dari pemerintahan Taliban untuk

⁴_____' 'Kembalinya Taliban, Politikk Kawasan dan Laut Cina Selatan, (Medcom.id, 2021). Diakses pada 5 Januari 2022 05.00 WIB.

⁵ Nafisah, 'Afghanistan di bawah Pemerintahan Taliban'.

⁶ Alemarah, 'Pemerintahan Imarah Islam, Kemakmuran Afghanistan', (Garda Nasional, 2019). Diakses pada 5 Januari 2022 05.47 WIB.

melindungi Osama bin Laden yang merupakan pemimpin al-Qaeda saat menghancurkan *World Trade Center* (WTC) tahun 2001, yang kemudian ini membuat Amerika Serikat menyerang Afghanistan agar segera menyerahkan Osama dan berdalih Taliban telah bersekutu dengan al-Qaeda. Hingga pada akhirnya kekuasaan Taliban bisa ditaklukkan dan ditundukkan oleh Amerika Serikat dan kelompok pasukan aliansi utara —pengikut Presiden Rabbani yang juga tidak suka dengan Taiban.⁷

Hal serupa juga terdapat dalam skripsi yang berjudul 'Dinamika Politik Afghanistan pada Masa Pemerintahan Taliban' yang ditulis oleh Al-Ghifari Ahda Abid, dari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, yang membahas tentang perkembangan politik sebelum Taliban berkuasa di Afghanistan. Pada saat itu terdapat dua ideologi di Afghanistan, yaitu ideologi Islam dan komunis. Kedua kelompok tersebut terlibat dalam peristiwa invasi Uni Soviet yang kemudian memicu perlawanan para mujahidin (kelompok pembela Islam) yang berada di Afghanistan. Perlawanan tersebut memunculkan kelompok baru yaitu Mujahidin – nama kelompok yang menjadi cikal bakal hadirnya Taliban atas gagasan Mullah Omar. Taliban pun berhasil menguasai Afghanistan dan menjalankannya negara Islam sekaligus sebagai markas kelompok militan Islam tersebut.⁸

Dari telaah pustaka yang telah disebutkan, Peneliti mengambil fokus pembahasan dan metode penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena di dalam penelitian ini berisikan hal yang sangat menarik sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai rujuakan oleh peneliti yang mengambil topik kajian serupa. Melalui salah satu pendekatan yaitu pendekatan historis-sosiologis dari teori Max Weber. Dengan teori dan pendekatan tersebut dapat memberikan sebuah gambaran kepada pembaca tentang adanya politik dibalik konflik Taliban di Afghanistan, baik itu hubungannya dengan Amerika, kelompok teroris al-Qaeda maupun Uni Soviet juga Tiongkok. Dan dari Penelitian ini ditemukan keterlibatan Amerika, Tiongkok dan Taliban yang mempunyai pengaruh konflik besar di Afghanistan dalam hal politik dan ekonomi. Dengan temuan tersebut akan memberikan pemahaman kepada pembaca agar tidak hanya memandang agama sebagai pengaruh konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh Taliban, termasuk juga dalam kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di sana.

Dari arah yang dikemukakan diatas telah terjelaskan baik secara history maupun

⁷ Ali Ma'ruf, '*Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Taliban Di Afghanistan (1996-2001)*', Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

⁸ Al-Ghifari Ahda Abid, *'Dinamika Politik Afghanistan pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)'*, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

perkembangan arah politik Taliban, sebagaimana melalukan pemberontakan terhadap Pemerintah Afghanistan itu dua kali. Pertama, di tahun 1994 Taliban muncul karena merasa pemerintah lalai dalam mejalankan tugasnya. Oleh sebab itulah kehidupan rakyat saat itu sengsara. Kemudian pemberontakan ini membawa Taliban menjadi penguasa di Afghanistan pada 1996 M dan mengatasnamakan jihad. Pada tahun 2004 Taliban kembali memberontak di Afghanistan untuk melawan pemerintah, pasukan Amerika dan NATO. Pemberontakan tersebut dilandasi ketidak percayaan Taliban terhadap pemerintah, Tindakan ini merupakan murni politik. Dengan demikian tujuan dalam kajian ilmiah ini adalah sejauh mana tingkat gerakan Taliban dalam memobilisasi orang untuk melakukan tindakan kekerasan, penelitian ini menekankan pada analisis historis, yaitu mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat Afghanistan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan historis-sosiologis dengan lensa teori Max Weber yang melihat adanya kekerasan dalam wacana keagamaan. Dengan menganalisis sejauh mana tingkat gerakan Taliban dalam memobilisasi orang untuk melakukan tindakan kekerasan, penelitian ini menekankan pada analisis historis, yaitu mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat Afghanistan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Perubahan Sosial Max Weber dalam Konflik Afghanistan

Tindakan kekerasan, seperti terorisme dan diskriminasi yang kabarnya dilakukan oleh kelomok militan Islam yang ekstrem selalu saja menebar ancaman dan menimbalkan korban. Max Weber (1958) mengungkapkan bahwa teror dan ancaman adalah sebuah bentuk kekerasan yang merupakan bagian dari salah satu hal utama dalam kemampuan, dan juga keahlian untuk menciptakan cita-citanya meski harus mendatangi niat yang berlainan. Prilaku kekerasan ini tidak muncul begitu saja tanpa sebab, namun muncul dari sebagai bentuk respon dari kolonialisme Eropa. Kekerasan juga bisa timbul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (interpersonal conflict), antar kelompok (inter-group), kelompok dengan negara (vertical conflict), dan konflik antar negara (inter-state conflict). 10

⁹ Max Weber, 'Sosiologi', Terj. Noorkholis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

¹⁰ M Ahyar Fadly, 'Gerakan Radikalisme Agama; Perspektif Ilmu Sosial', Jurnal El-Hikam, 9.1 (2016), pp. 87-104.

Max Weber memperkenalkan dua konsep terkait tindakan sosial, yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman (interpretative understanding atau verstehen) yang menyangkut metode untuk menerangkan konsep tersebut -konsep tindakan sosial. Agar dapat mendalami terkait pola sejarah dan masyarakat kontemporer, maka Weber membuat pemikiran tentang tipe ideal tindakan sosial, hubungan sosial, juga kekuatan. Max Weber juga mengungkapkan bahwasanya selalu terdapat kepentingan alamiah dalam diri manusia yang mendorongnya untuk memperoleh kekayaan (wealth), serta keinginan untuk mewujudkan tujuan penting dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Konflik-konflik atau tindak kekerasan yang muncul dalam setiap entitas stratifikasi sosial –perbedaan posisi sosial pada tiap individu di masyarakat. Setiap stratifikasi ini adalah suatu posisi yang layak untuk diperjuangkan oleh manusia, baik bagi setiap individu juga kelompoknya. Sehingga mereka memperoleh posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, relasirelasi sosial manusia diwarnai dengan usaha-usaha untuk meraih posisi tinggi dalam stratifikasi sosial yang diwarnai dan diwujudkan melalui tindakan *zwectraditional* dari tipe ideal tindakan Weber. Adapun Zwecrational adalah salah satu dari klasifikasi tindakan individu yang diungkapkan oleh Max Weber. Adapaun *zwecrational* diartikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan *means and ends*, yaitu tujuan-tujuan (*means*) yang bisa dicapai dengan bantuan alat, cara atau media perantara (*ends*); Tindakan yang berorientasi tujuan¹².

Keterlibatan antara agama dan terorisme (tindakan radikal/kekerasan) menjadi salah satu faktor permasalahan yang penting. Pada umumnya, kita menyangkal salah satu kelompok gerakan yang melakukan tindak kekerasan. Namun pada hakikatnya sebagian besar agama dan bangsa mengambil jalan kekerasan dalam perjuangan, peperangan, serta revolusi mereka yang disepakati dan dilegalkan, seperti perang salib, revolusi Prancis, revolusi Amerika termasuk juga jihad yang dilakukan Taliban di Afghanistan. Perbedaannya adalah proses mobilisasinya terhadap peran agama dalam konflik tersebut, karena yang lazim terjadi adalah agama dijadikan sebagai topeng untuk melegitimasi tindak kekerasan yang mereka lakukan, dan mereka menganggapnya itu sebagai tindakan yang benar dan salah satu jihad membela agama. Salah satu hal yang bisa dijadikan alasan banyaknya kelompok yang melakukan tindak kekerasan mengatasnamakan agama Islam adalah karena kurang adanya otoritas (kewenanangan) keagamaan sentral dalam Islam ¹³. Oleh karenanya, Islam sering disalahgunakan dan

¹¹ Tom Campbell, *'Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan'*, Terj. F. Budi Hadirman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

¹² Pip Jones, Liz Bradbury and Le Boutillier, '*Pengantar Teori-teori Sosial*', Terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

¹³ Fadly, 'Gerakan Radikalisme Agama'.

dimobilisasi untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan individu, utamanya yang melegitimasi kekerasan atas nama agama.

Kebanyakan gerakan-gerakan ektremis fundamentalis itu bersifat Islami, dalam artian ingin mendirikan negara Islami yang sesuai dengan Islam yang mereka pahami, sistem khilafah atau negara yang masyarakatnya berislam secara menyeluruh. Serta, peranan agama yang multidimensional diimplementasikan melalui pembenaran dari mereka yang ikut serta dalam tindakan radikalisme atau terorisme global.

Pada banyaknya kasus, telah teridentifikasi bahwa fungsi agama terutama sebagai strategi untuk melegitimasi perjuangan dan memobilisasi dukungan massa. Hasil temuan dari Esposito (2010) dalam berbagai kasus membuktikan bahwa keterlibatan agama dalam perselisihan antar penganut kepercayaan seperti Katolik dan Kristen di Irlandia Utara; Muslim Bosnia, Ortodoks Serbia, dan Katolik Kroasia di Balkan; Tamil dan Sinhala di Sri Lanka; Kristen dan Muslim selama perang sipil di Lebanon; Sunnah dan Syi'ah di Irak pasca Saddam; begitu juga di antara para teroris dalam tragedi 11/9 (WTC dan Pentagon); termasuk juga beberapa kasus di Indonesia, adalah strategi untuk meraih dukungan massa dan kekuasaan politik. Dan tindakan seperti ini yang harus diluruskan, karena pada hakikatnya samua agama, khusunya Islam hanyalah agama yang dijadikan sebagai mobilisasi politik kelompok tertentu.¹⁴

Afghanistan setelah Kemunduran Uni Soviet

Dalam sejarah Afghanistan pemerintahan Taliban yang berada dibawah kekuasaan Afghanistan terjadi invasi oleh Uni Soviet secara militer. Bagi Afghanistan, pada tahun 1979 dijadikan sebagai tahun yang memiliki momen berharga. Faksi-faksi yang dibawa oleh kelompok mujahidin berusaha ingin menghancurkan invasi Soviet, namun karena terpecah akibat adanya faksi-faksi tersebut yang diakibatkan ideologi yang sama sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui lebih jelas melalui karya dari David B. Edwards yang berjudul 'Before Taliban Genealogies of Tthe Afghan Jihad' yang menjelaskan bahwasannya awal mula berkembangnya faksi-faksi mujahidin tersebut merupakan salah satu reaksi terhadap adanya kondisi politik yang terjadi di Afghanistan pada saat itu.

Ketika terjadi perebutan kekuasaan di Afghanistan oleh sekelompok golongan politikus yang dimulai pada tahun 1978. Selama kurun waktu tersebut, Uni Soviet membubuhkan tanda tangannya dalam sebuah perjanjian persahabatan dengan cara menguasai partai ekstrimis di Afghanistan, mendukung pemerintahan Afghanistan dengan terus membekali sebuah fasilitas

¹⁴ *Ibid.* p. 99.

yaitu beragam senjata. Pada bulan oktober 1979, Uni Soviet memberikan nasihat kepada kelompok Hafizullah Amin untuk dapat berhati-hati terhadap jatuhnya pemerintahannya. Sehingga, pada tanggal 24 Desember 1979 Uni Soviet menyerang kekuasaan Afghanistan dan meruntuhkan pemerintahan Hafizullah Amin.

Afghanistan mengalami kekacauan dan kerusuhan dalam negeri sehingga dapat menyaksikan kemunculan Taliban yang bisa menguasai negara Kabul pada tahun 1996. Afghanistan merupakan negara yang menyibukkan dirinya dengan perang yang dipicu karena adanya perbedaan faksi (kelompok politik) para mujahidin. Ketidakberdayaan pemerintah dalam menjaga kestabilan Afghanistan tersebut kemudian menyatukan faksi-faksi sehingga membuat Taliban muncul sebagai kekuatan yang dominan dan memiliki pengaruh di bidang politik juga agama. Akhir dari penyelesaian konflik yang terjadi diantara kedua negara tersebut, pernah diselesaikan melalui jalur mediasi dengan PBB. Pada tahap pertama, sangat mirip dengan penandatangan kesepakatan janewa yang terjadi pada april 1954 lalu. Yakni mediasi dan negosiasi dengan Taliban yang dipimpin oleh Diego Cordovez dengan dihadiri oleh peserta kesepakatan dari Afghanistan dan Pakistan. Sedangkan, Amerika Serikat dan Uni Soviet mendatangani sebagai pihak penjamin.

Tahap kedua pada bulan Februari 1989 Uni Soviet mengalami kemunduran dari Afghanistan yang ditandai dengan pengunduran Cordovez dan berakhirnya mandat PBB pada UNGOMAP (*United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan*) pada tanggal 15 maret 1990. Kemudian, terjadi perdamaian antara Afghanistan dan Pakistan yang terjadi pada tahun 2011 yang ditengahi oleh negara Turki untuk membantu menyelesaikan konflik diplomatik. Pada tanggal 27-28 Januari 2011 terdapat sebuah keputusan kerja sama bersama antar empat negara yaitu Afghanistan, Pakistan, Iran dan Takjikistan. Yang mana kerjasama tersebut dikenal dengan istilah *Joint Statement*. ¹⁶

Pasukan Uni Soviet menarik pasukan dan meninggalkan Afghanistan, sehingga pada kurun waktu 10 tahun lamanya timbul konflik antara Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan (PDPA) yang didukung oleh Uni Soviet. Dan para pemberontak mujahidin yang memperoleh dukungan dari beberapa negara muslim seperti: Pakistan, Arab Saudi, Iran, Mesir dan Yordania. Pada bulan Desember 1979 para pemberontak itu mengirimkan sekitar 75.000 pasukan militer dari Uni Soviet untuk menyerbu Afghanistan dan membunuh presiden baru

¹⁵ David B. Edwards, 'Before Taliban: Genealogis of the Afghan Jihad', University of California Press, 2022, pp. 1-376.

¹⁶ Umiyati Haris, 'Penyelesaian Konflik Afghanistan-Pakistan: Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi', (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2016, p. 69.

yang bernama Hafizullah Amin untuk menggantikan pengikut Soviet lainnya.

Pada tahun 1898 sampai 1992, Uni Soviet mulai bergegas untuk mundur dari Afghanistan sehingga Najibullah salah satu kepolisian di Afghanistan yang telah menjabat sebagai presiden, berusaha untuk menyelesaikan perang saudara yang sedang berlangsung tanpa bantuan dari pasukan Uni Soviet. Mereka juga hendak membangun pemerintahannya melalui rekonsiliasi nasional dengan cara menjauhkan diri dari sosialisme dan nasionalisme di wilayah Afghanistan. Namun, pihak Uni Soviet masih tetap ingin membantu dalam segi perekonomiannya, sementara negara Pakistan dan Amerika Serikat mendukung kelompok Mujahidin.¹⁷

Berbagai cara yang telah dilakukan Najibullah seperti: menjauhkan diri dari sosialisme dan nasionalisme, membersihkan negara dari adanya satu partai, membiarkan kelompok non-komunis bergabung dengan pemerintahan, melakukan dialog dengan kelompok Mujahidin dan perihal tentang komunisme yang telah dihapus. Tetapi, strategi tersebut tidak dapat menarik simpati kelompok mujahidin. Bubarnya Uni Soviet membuat Kesabaran Najibullah telah habis hingga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri pada April 1992, sehingga Najibullah tidak lagi mendapatkan sejumlah bantuan dari Uni Soviet serta mengakibatkan sistem pemerintahannya mulai runtuh.

Kelompok Mujahidin yang dipimpin oleh Syah Mas'ud pada tahun 1992 akhirnya berhasil menghilangkan sistem sosialisme Uni Soviet-Rusia yang berada di Afghanistan. Hal tersebut ditandai dengan sakitnya pemimpin Soviet yang bernama Najibullah, sehingga mengakibatkan pemerintahan Mujahidin yang masyarakatnya hijrah untuk meninggalkan kawasan Afghanistan. Pada akhirnya perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berlangsung, komunisme Uni Soviet dipandang sebagai perluasan dan penyebaran ideologi. Seketika Uni Soviet mempengaruhi Afghanistan dengan cara mendekati salah seorang tokoh yaitu Abdullah Azzam, salah seorang pejuang perlawanan Afghanistan saat melawan Uni Soviet yang menyebabkan adanya efek perang dingin terhadap adanya kekuasaan monarki yang mundur dari Afghanistan tersebut.

Mulai tahun 1955, Uni Soviet memberikan bantuan dan menyediakan segala kebutuhan Afghanistan yaitu berupa uang kredit sebesar 100 juta USD untuk membantu berjalannya proyek-proyek pertanian dan perindustrian. Serta mampu membuat Afghanistan untuk membeli perlengkapan militer, menyediakan pesawat jet juga infrastruktur yang memadai. Bantuan-bantuan tersebut diberikan untuk membuktikan bahwa Afghanistan membantu dalam

¹⁷ Larry P. Goodson, 'Afghanistan's Endless War', (London: Universitas Washington Press, 2001).

proses modernisasi yang telah dipengaruhi oleh kekuatan barat yang berselisih dengan faktor ideologis. Selama periode 1950-1960 Afghanistan membangun modernitas infrastruktur dan ideologis yang berada di san atas bantuan dari Uni Soviet yang bekerjasama dengan Amerika.

Hubungan Amerika, Taliban, dan Afghanistan

Sebelumnya terjadinya peristiwa 9/11 atau pengeboman World Trade Cebter (WTC) di Kota New York pada 11 September, kelompok al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden telah terlibat konflik dengan Amerika Serikat. Hal itu dibuktikan dengan adanya peristiwa penyerangan Kedutaan Besar (kedubes) Amerika Serikat di Kenya pada Agustus 1998 yang menewaskan tidak kurang dari 300 korban.¹⁸

Sebab itulah yang menjadi sumbu konflik antara Amerika dan Afghanistan. Tepat setelah kejadian itu Amerika melakukan penyerangan beruntun kepada mengirimkan misil ke wilayah timur laut Afghanistan. Tidak berhenti di sana, pada 7 Oktober 2001 koalisi militer yang dipimpin Amerika juga melakukan serangan dan meruntuhkan rezim Taliban pada Desember 2001.¹⁹ Sebelum itu terjadi, kelompok Al Qaeda pada tahun 1996 dipimpin oleh Osama menyerukan "Declaration of Jihad" terhadap keluarga kerajaan Saudi dan Amerika. Namun Osama dapat di bunuh oleh Amerika di Pakistan pada 1 Mei 2011.

Konflik Amerika Serikat dan Taliban memanas setelah tragedi 9/11. Amerika menyebut bahwa Taliban adalah sarang bersembunyinya komplotan teroris yang juga tergabung dengan jaringan al-Qaeda. Setelah kejadian tersebut, secara mufakat atas kordinasi para pejabat tinggi Amerika, mereka mendeklarasikan perang melawan teroris, termasuk pemburuan teroris yang berada di Afghanistan.²⁰ Tindakan ini memperolah dukungan dari berbagai pihak dan otoritas keagamaan –mulai dari Keuskupan; Kardinal; juga pimpinan politik- juga beberapa negara. Namun, hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menangkap pelaku terorisme, tapi lebih kepada tindakan pemusnahan kelompok Taliban yang merupakan kelompok radikal Islam. Ini diakarenakan kelompok radikal sangat berpotensi menaikkan suhu perpolitikan dunia, terutama antara Islam dan Barat, dan ini harus diwaspadai.

Bentuk dukungan dari negera-negara yang turut mendukung beragam, mulai dari Jepang yang menyediakan transportasi berupa pesawat untuk mengangkut pengungsi yang berada di

¹⁸ Istman Musaharun Pramadiba, 'Menlu Amerika Mike Pompeo Sebut Iran Jadi Markas Baru Al Qaeda', Tempo, 2021. Diakses pada 8 Januari 2022 13.50 WIB.

^{&#}x27;Siapakah Kelompok Taliban?', BBCIndonesia, 2009. Diakses pada 10 Januari 2022.

²⁰ Sulistyo Adi, 'Mengenal Afghanistan', Jurnal Al-Jamiah, 36, 2008, pp. 46-66.

Afghanistan. Inggris juga bergabung dengan mengutus *Special Air Service* (SAS) yang adalah pasukan elite Inggris, dan Inggris juga mengizinkan lapangan udaranya digunakan untuk keperluan menyerang teroris. Hingga 2016 (lalu) Amerika masih terus mengirimkan pasukan penyerangan ke Afghanistan untuk menekan kekuatan merek, karena disinyalir jaringan Taliban dan al-Qaeda masih eksis, terbukti dengan masih signifikannya serangan-serangan yang mereka lancarkan.

Namun, sejatinya keterlibatan Amerika dengan Afghanistan tidak hanya sebatas itu. Sebelumnya memanasnya konflik diantara keduanya, dulu berselang beberapa jam setelah Taliban menguasai Afghanistan tepatnya pada September 1996, Pejabat pembantu Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Glyn Davies menyatakan bahwasanya AS mendukung hal tersebut dengan kepentingan menggalang kekuatan untuk membantu AS dalam program pipanisasi minyak melalui Afghanistan dan Pakistan dari beberapa negara eks-Soviet. Mereka tidak peduli sekalipun dengan visi Taliban untuk mendirikan Syariat Islam.

Namun, peta politik berubah setelah Amerika Serikat gagal mendapatkan kesepakatan dan dukungan dari Taliban meski setelah pihaknya melakukan beberapa kali pertemuan dengan Taliban untuk bernegosiasi. Padahal, dari informasi yang dirilis oleh *Energy Information Administration*, Amerika Serikat per harinya setidaknya perlu mengimpor minyak sebesar 18,8 juta barrel. Setelah mengkalkulasi besarnya pengeluaran tersebut, dirasa sangat perlu menjalankan program pipanasi 400 mil melalui Afghanistan, namun hal itu malah berujung dengan hasil yang kurang memuasakan. Setelah kejadian itu, Taliban pun dilegitimasi sebagai musuh atas nama kelompok teroris yang harus diperangi, dengan alasan Taliban kurang demokratis.

Dari beberapa fakta di atas sudah sangat jelas, bahwasanya pecahnya konflik antara Amrika Serikat dan Taliban tidak murni atas nama agama, namun ada aspek politik dan ekonomi yang menungganginya sebagai aspek penting yang juga tidak bisa dinafikan. Dari segi politik, jelas bahwa Amerika ingin menujukkan kekuatan serta pengaruhnya dalam kostelasi perpolitikan dunia dengan mendeklarasikan peran terhadap teroris yang kemudian mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang mana hal ini juga tidak terlepas dari keinginan Amerika Serikat untuk menguatkan hegemoninya di wilayah Timur Tengah.

Kemudian dari segi ekonomi, Amerika Serikat sangat berambisi untuk menjalankan program pipanasi melalui jalur Afghanistan untuk memenuhi banyaknya pasokan minyak yang dibutuhkan setiap harinya, sehingga mereka berusaha menjalin kerjasama dengan Taliban yang saat itu menguasai Afghanistan, namun hal itu malah berujung penolakan dari pihak Taliban. Dan Amerika Serikat mendaklarasikan perang kepada Taliban yang jelas ini hanyalah politisasi

agama dalam konflik Afghanistan.

Atas kekayaan Afghanistan itu pula Taliban tidak melepaskanannya ke Amerika. Taliban menguasai ekonomi dan mengeksploitasi sumber daya alam di Afghanistan. Mulai dari pemberlakuan pajak sebesar 50% pada perusahaan yang beroperasi di Afghanistan hingga pemberlakuan pajak 6% sebagai pajak impor ke Afghanistan ²¹. Oleh karena itu Afghanistan menjadi sumber pendapatan tetap untuk Taliban. Tidak cukup sampai di sana, Taliban juga menguasai 96% ladang opium di Afghanistan dan menetapkan pajak yang besar terhadap perusahaan tersebut, yang keseluruhan keuntungannya dialokasikan untuk membeli senjata, amunisi serta bahan bakar untuk perang. Dikatakan Afghanistan menghabiskan uang sebesar 300 juta USD dalam satu tahun, dan semua dana tersebut Taliban bergantung pada pendapatan opium dan pajak atas Afghanistan dan Pakistan.²²

Kebijakan Taliban Atas Afghanistan

Berdirinya kelompok Taliban ini sangat sesuai dengan semangat dan visi dari pendirinya, Mullah Muhammad Omar. Yakni Islam dan Jihad yang seandainya dikatakan akan terucap "Mempertahankan keyakinan dan kehormatan." Statement "Strategi melawan" pun menjadi serta membentuk watak kebanyakan masyarakat di Afghanistan. Namun tidak dengan kaum mujahidin, meski telah menundukkan Uni Soviet, dan berhasil menguasai Kabul mereka (kaum mujahidin) tidak menjaga stabilitas sosial dan politik, apalahi yang berasaskan hukum Islam. Sehingga hal itu menggerakkan Muhammad Omar untuk melakukan tindakan baru yang ia awali dari madrasah. kelompok tersebut beranggotakan para pelajar dari daerah Pasthun di Afghanistan (1994). Muhammad Omar kecewa dengan lemahnya hukum Islam di Afghanistan dengan banyaknya aparat yang korup dan marak terjadinya pemerkosaan yang menyebabkam ketidakstabilan di Afganistan. Dan itu pula lah yang membuat 15.000 pelajar yang mayoritas berasal dari pengungsi Afghanistan dan dari pelajar di Pakistan tetarik untuk ikut andil dan bergabung dengan kelompok Taliban.

Mujahidin mengalahkan Uni Soviet dan meninggalkan Afghanistan. Lalu tidak lama berselang estafet kekuasaan atas Afghanistan berpindah tangan pada kelompok Taliban,

²¹ Neamatollah Nojumi, 'Afghanistan in the International System. In The Rise of The Taliban in Afghanistan', (New York: Palgrave Macmillan, 2002), pp. 182-205.

²² Pierre-Arnaud Chouvy, 'Opium: Uncovering the Politics of the Poppy', (Bloomsbury Publishing, 2009).

kelompok yang baru berdiri 2 tahun sewaktu menguasai Afghanistan. Pada mulanya Taliban memang hanya ingin menciptakan negara Islam yang kondusif, namun visi tersebut berganti untuk mendirikan negara Islam dengan berdalih stabilitas dan keamanan negara. Mereka ingin membangun Afghanistan berbasis syariat Islam, yang artinya segala macam aturan di sana di dasarkan atas hukum Islam. Adanya Kementrian *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* atau kementrian Pengajak Kebaikan dan Pencegah Kejahatan menjadi salah satu indikasi diterapkannya hukum Islam di Afghanistan. Kementrian inilah yang kemudian mengawasi dan mengontrol berjalannya penerapan hukum Islam di sana. Biasanya mereka menugaskan satuan-satuan keamana atau polisi di sana untuk mengawasi masyrakat Afghanistan agar selalu tertib dan patuh kepada hukum, hal inilah yang menurut barat sebagai penerapan hukum yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena adanya pemasungan hak-hak manusia.

Taliban mengganti semua kebijakan-kebijakan sosial dan plitik dengan berbasis Islam, meliputi juga adat-adat yang berlaku di sana. Kekagetan budaya yang begitu signifikan dan kontras inilah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat Afghanistan. Karena pada faktanya memang Afghanistan merupakan negara dengan masyarakat yang terikat dengan aturan tradisional yang dipengaruhi oleh suku dan sekte dalam suatu wilayah. Memang secara sekilas hal ini dinilai sebagai pemersatu hukum yang revolutif terhadap aturan tradisional yang berlaku di beberapa suku di Afghanistan. Namun unsur pemaksaan inilah yang dinilai kurang tepat. Dan memang sebagian besar masyarakat Afghanistan merasakan kekegaetan atas diterapkannya hukum Islam yang sangat ketat tersebut. Taliban memang sangatlah serius dalam menggalakkan pembangunan negara Afghanistan berbasis hukum Islam sebagai identitas dasar hukum negara.

Hal itu terbukti dengan beberapa aturan yang berlaku di sana dengan penerapan hukum Islam yang dinilai sangat ketat di Afghanistan meliputi; 1) siaran radio yang boleh disiarkan dan didengarkan hanyalah berita dan pengajian, musik pun tidak diperbolehkan kecuali musikmusik yang bernuansa Islami; 2) tidak diperkenankan menonton bioskop, televisi, video serta komputer, karena hal ini dapat mempermudah mengakses pornografi dan tayangan yang dapat menganggu ibadah mereka; 3) hanya diperbolehkan menggunakan foto untuk identitas dan pas foto; 4) pelaku pencurian akan dipotong tangannya sesiau dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku; 5) penegasan terhadap aturan sholat wajib dan berjamaah. Mereka menegaskan masyarakat Afghansitan untuk sholat tepat waktu dan dilakukan secara berjamaah. Bagi mereka yang melanggar akan dikenai denda. Mereka juga menerapkan hukum yang berada di Arab Sudi, yakni apabila masih ada toko yang buka di saat waktu shalat jum'at maka pemilik tokonya akan dikenai hukuman penjara selama 10 hari.

Kurang lebih masih ada limabelas lagi aturan ekstrem yang diberlakukan Taliban kepada masyarakat Afghanistan, terlebih dengan banyaknya hukum yang mendeskriminisi kaum

perempuan. Mulai dari pelarangan kerja di luar rumah, tidak diperbolehkan keluar rumah

sendirian, tidak berhak mendapatkan pendidikan, diposisikan sebagi makhluk sub-ordinat.

Penguatan hukum Islam sebagi penjaminan keamanan yang dilakukan Taliban atas Afghanistan ini memang terbukti, khusunya bagi mereka yang berada di wilayah terpencil, di dekat perbatasan dan yang sedang terjadi konflik. Misalnya saja di Kabul, sebelum dikuasai oleh Taliban pada tahun 1922, Kabul selalui dikirimi roket oleh kelompok Hikmatyar dengan tujuan untuk mencabut legitimasi Rabbani²³ di sana. Kelompok Hikmatyar pun dihancurkan oleh Taliban dan mengembalikan stabilitas keamanan di Kabul. Kemanan mereka mereka memang sangat terjamin dibandingkan dengan sebelum adanya kelompok Taliban, terlepas dari bagaimana orang-orang Afghanistan menjalani kehidupan mereka ditengah ketatnya hukum Islam yang diterapkan oleh Taliban.

Namun, dari banyak dan ketatnya hukum Islam yang diterapkan di sana, orang-orang Taliban malah melegalkan bisnis opium bahkan menjadikannya sebagai pemasukan utama yang menopang seluruh kebutuhan kelompok Taliban dari segi ekonomi. Mulai dari kebutuhan logistik hingga alat perang. Karena pembangunan negara berbasis syariah Islam di Afghanistan ini tidak semata-mata untuk menjaga keamanan dan sebagai identitas saja. Namun sebagai legitimasi masyarakat sebagai identitas yang satu agar Taliban dapat melanggenggkan kekuasaannya.

Dan benar, penerapan hukum Islam di Afghanistan ini membentuk identitas baru di Afghanistan. Dengan bergantinya sistem peta politik, sosial, dan budaya ini menjadi indikasi bahwa gerakan ini sebagai gerakan revolusi Islam yang disuarakan oleh kelompok Taliban. Identitas ini sebenarnya telah lama digalakkan oleh gerakan perlawanan Islam yang lahir dari hasil konflik dan peperangan saat melawan Uni Soviet, Dan Taliban di sini tentunya mendapatkan dukungan besar dari kelompok tersebut, yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan membaranya semangat orang-orang Afghan terhadap hal itu, sehingga berdampak pada cepatnya pembangunan dan perkembangan infrastruktur-infrastruktur militer milik Taliban di

⁻

²³ Rabbani atau Burhanuddin Rabbani adalah salah seorang presiden Afghanistan keturunan Tajik yang memimpin pada masa transisi politik (1992-1996) dan kemudian digulingkan kekuasaannya oleh Taliban pada tahun 1996, hingga ia menentang Taliban dengan menjadi ketua kelompok Aliansi Utara (*Northen Alliance*) yang merupakan kelompok perlawanan terhadap rezim Taliban. Dan menjabat yang kedua kalinya pada tahun 2001 setelah berhasil menggulingkan Taliban atas dukungan PBB dan aliansi kelompok-kelompok utara. Ia juga merupakan pemimpin Jamiat-e Islam Afghanistan. Ia Dikabarkan meninggal akibat ledakan bom di rumahnya di Kabul yang didalangi oleh Taliban pada 20 September 2011. Nasru Alam Aziz, *'Mantan Presiden Burhanuddin Rabbani Dibunuh'*, (Kompas.com, 2011).

Afghanistan. Afghanistan sampai digadangkan sebagai rumah masa depan bagi kaum jihadis Islam di seluruh dunia. Sebagai masa transisi kekuasaan usai ditinggalkan oleh Uni Soviet, gerakan ini tentu dapat legitimasi dan dukungan yang kuat dari kelompok mujahidin.

Mujahidin dan Taliban yang dulu merupakan kelompok yang sangat didukung oleh Amerika dan Pakistan sebagai eks-Soviet itu kini menjadi petaka dan menjadi musuh bagi mereka sendiri (istilah: senjata makan tuan), karena menjadi kelompok dominan yang kini memiliki semangat besar mendukung kekuasaan Taliban utamanya pada masa tranasisi kekuasaan.²⁴

Pengaruh Konflik Taliban dan Afghanistan

Pengaruh konflik perang Taliban dan Afghanistan mendapatkan pengaruh yang sangat besar, diantaranya Pihak Amerika Serikat menghentikan anggaran militer di Afghanistan yang semula termasuk dalam pengeluaran besar selama 18 tahun di Afghanistan. Kemudian Amerika Serikat memilih untuk menyediakan anggaran militer untuk kepentingan yang lebih besar. Sehingga, keuntungan tersebut menjadi sebuah pertimbangan untuk dapat menghentikan krisis pasukan sebagai akibat dari adanya invasi. Amerika Serikat juga berusaha untuk medistribusi ulang beban militer dari amerika serikat kepada Afghanistan, pemindahan pasukan dan penutupan pangkalan militer. Dalam proses perdamaian antara Amerika Serikat dan Afghanistan terdapat pembicaraan dari kelompok pemberontak yaitu Taliban. Dalam faktor kepolitikan, sistem politik yang terjadi di pemerintahan Afghanistan semakin melemah dan proses negosiasi lebih mengedepankan pendekatan struktural.

Pada bulan April 1988, pihak Uni Soviet mengikuti *ganeva peace accords* yang merupakan salah satu fasilitas dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian, pada akhirnya tanggal 15 Februari 1989 pihak Uni Soviet menarik pasukannya sehingga konflik bersenjata di Afghanistan secara otomatis berakhir. Tahap awal konflik mulai terjadi antara pemerintah Afghanistan di bawah pimpinan Presiden Najbullah yang berhadapan dengan kelompok mujahidin. Hingga akhirnya, pada tahun 1989 kelompok mujahidin mengalami kekalahan di Jalabad. Namun, seketika Uni Soviet runtuh, dan kelompok mujahidin yang memenangkan peperangan tersebut.

²⁴ Nafisah, 'Afghanistan di bawah Pemerintahan Taliban', p. 41-43.

Pengaruh Konflik Taliban dalam Ekonomi dan Keamaan China

Konflik Taliban di Afghanistan ini juga berpengaruh pada politik Tiongkok, terlebih saat upaya perdamaian yang dilakukan antara Taliban dan Afghanistan. Yakni terjalinnya persabahatan dan kerja sama antara Tiongkok dan beberapa negara yang terlibat konflik dengan Taliban, yakni Amerika Serikat, Pakistan dan Afghanistan. Mereka menuai kesepakatan dan memutuskan untuk membentuk *Quadrilateral Coordination Group*. Forum ini terbentuk pada 9 Desember 2015, dari kesepakatan beberapa pihak pada sela-sela pertemuan *The Heart of Asia Conference* di Islambad. Yang keseluruhan pihak berkomitmen untuk menciptakan perdamaian Afghanistan, dan salah satu kuncinya adalah mendamaikan Taliban dengan Afghanistan. Hal ini bertujuan untuk mencapai stabilitas di Afghanistan dan wilayah sekitarnya.²⁵ Upaya yang mereka tempuh dengan proses negosiasi dan rekonsiliasi antara Taliban dan Afghanistan, salah satunya melalui *Shanghai Coorperation Group* yang beranggotakan Tiongkok sendiri, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirghiztan.²⁶

Zhao Hong mengungkapkan bahwasanya Afghanistan merupaka salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan untuk membangun stabilitas keamanan di Provinsi Xinjiang. Tiongkok memiliki kekhawatiran terhadap kelompok Uighur di Provinsi Xinjiang yang merupakan gerakan Islam separatis Afghanistan. Kekhawatiran terhadap pengaruh ideologi pam-Islamisme oleh kelompok yang berada di Pakistan dan Afghanistan juga menjadi salah satu pemicunya.²⁷

Tiongkok beranggapan, selain perdamaian ini penting bagi keamaan wilayah kekuasaanya, yakni Provinsi Xinjiang, stabilitas keamanan di Afghanistan ini juga sangat penting bagi investasi Tiongkok di Afghanistan dan wilayah sekitarnya. Ini artinya secara tidak langsung konflik yang terjadi antara Taliban dan Afghanistan memeberikan dampak kepada investasi Tiongkok, sehingga juga berpengruh pada ekonomi Tiongkok. Hal ini terbukti dengan banyaknya investasi Tiongkok di Afghanistan, mulai dari investasi penambangan tembaga di Mes Aynak dengan capaian aset sebasar 3,4 miliar USD ²⁸. Khan juga menjelaskan bahwa Afghanistan berhasil mendapatkan invesatasi perusahaan asal Tiongkok pada tahun 2007 di

²⁵_____, 'FIRST MEETING OF QUADRILATERAL COORDINATION GROUP HELD IN ISLAMBAD', (Pakistan: Arvnews) Diakses pada 8 Januari 2022.

²⁶ Nima Khorrami, 'Post-US Afghanistan: What Role for The SCO?', (Cabar Asia, 2021). Diakses pada 8 Januari 2022.

²⁷ Zhao Hong, 'China's Afghan Policy: The Forming of The Marzh West Strategy?', (The Journal of East Asian Affairs, 27.2, 2013), pp. 1-29.

²⁸ Daveed Gartenstein-Ross, Trombly, dan Barr, "China's Post-2014 Role in Afghanistan," 9.

Aynak tersebut adalah dengan bermodalkan banyaknya kekayaan mineral yang dimiliki oleh Afghanistan²⁹.

Tidak sepertihalnya Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan sistem demokrasi Brata dalam pendekatannya membangun stabilitas di Afghanistan. Tiongkok tidak pernah menganggap kelompok maupun bentuk pemerintahan di Afghanistan sebagai masalah, namun Hong menjelaskan bahwa fokus utama tiongkok di Afghani-sunni sustan adalah faktor ekonomi. Afghanistan juga dikabarkan memiliki cadangan minyak mencapai 1,596 juta barel dan cadangan gas alam sebesar 15,687 triliun kubik, serta banyaknya mineral yang membuat Tiongkok terhipnotis dan tergiur untuk berinvestasi pada Afghanistan³⁰.

Selama 13 tahun terakhir, China telah diuntungkan dengan membiarkan ihak lain terlibat dalam melakukan pengamanan terhadap konflik di Afghanistan. Beberapa kebijakan utama yang menguntungkan China antara lain. Pertama, menekan Pakistan sebagai sekutu terdekat di kawasan tersebut untuk menindak kelompok-kelompok Uighur di daerah kekuasaannya. Kedua, terlibat dan bernegosiasi dengan VNSA (Violent Non-State Actor: Kelompok Kekerasan non-Pemerintahan) termasuk di dalamnya adalah Taliban. Hal ini menguntungkan guna memastikan keamanan investasi komersial dan juga mencegah kelompok-kelompok Uighur membangun pijakan di Afghanistan. Karena kelompok VNSA sendiri adalah salah satu kelompok yang memiliki kekuatan besar di bidang ekonomi, politik juga sosial dan berpengaruh pada tingkat nasional hingga internasional. Dalam hal ini VNSA mengahalalkan tindak kekerasan juga teror dalam melancarkan agendanya. Ketiga, bekerja dengan Rusia dan beberapa negara di Asia Tengah dalam kerangka multilateral guna memberi keamanan bersama.³¹

Sebab keuntungan ekonomi juga keamana yang diperoleh oleh China atas wilayah perbatasannya itulah China menjadi sangat terlibat dalam keamanan proyek-proyek ekonomi di Afghanistan. Sehingga bersekutu dengan Taliban dan lebih memilih terhindar dari risiko konflik dipilih oleh China sebagai jalan politiknya. Berbeda dengan Amerika yang memakai sistem pendekatan berbeda sehingga pasukan Taliban menolak upaya kerjasama antara keduanya, yang sebenarnya kedua negara tersebut (China da Amerika) sama-sama ingin mendapatkan keuntungan atas konflik Taliban di Afghanistan dari sumber daya yang berada di sana.

²⁹ Raja Muhammad Khan, 'China's Economic and Strategic in Afghan', FWU Journal of Social Sciences, 1.1, 2015)

³⁰ Hong, 'China's Afghan Policy',

³¹ Gartenstein-Ross, 'China's Post-2014'.

p-ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 18 (2) 2022

e-ISSN: 2655-6057 https://ejounal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

57

Kesimpulan

Taliban adalah salahsatu gerakan islam sunni yang awalnya memimpin negara Afghanistan. Gerakan dikenal sebagai gerakan islam yang kaku dan keras dalam menyebarkan agama islam. Lahirnya kelompok Taliban akibat adanya faktor persaingan panglima lokal yang mempunyai unsur kepolitikan di Afghanistan. Pada masanya pasukan Taliban mengubah visi dan misi politiknya di Afghanistan dengan menggunakan dua cara yaitu: Presiden Rabbani dan Hikmatyar beserta para pasukannya masing-masing.

Menurut teori perubahan sosial yang diperkenalkan oleh Max Weber dalam konflik Afghanistan bahwa terorisme dan radikalisme merupakan sebuah bentuk kekerasan. Kekerasan tersebut muncul akibat perbedaan konflik yaitu: konflik antar orang (interpersonal conflict), antar kelompok (inter-group), kelompok dengan negara (vertical conflict), dan konflik antar negara (inter-state conflict). Tindakan kekerasan tersebut biasanya dijadikan sebagai pedoman dari bentuk perjuangan, peperangan dan revolusi salah satunya jihad Taliban yang dilakukan di Afghanistan. Dalam artian jihad dalam membela agama, kadang disalah artikan dengan kekerasan atas nama agama. Islam sebagai salah satu agama yang sering menjadi sasaran empun kekerasan atas nama ini diakibatkan karena kurangnya otoritas keagamaan yang sentral dalam Islam, sehingga agama Islam disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau individu yang melegitimasi kekerasan atas nama agama. Meski kekerasan atas nama agama ini juga tida menutup kemungkinan menyasar agama selain Islam.

Setelah Uni Soviet menarik pasukannya dan mundur dari Afghanistan, terjadi perdamaian antara Afghanistan dan Pakistan (2011) yang ditengahi oleh negara Turki untuk menyelesaikan konflik diplomatik pada tanggal 27-28 januari 2011 sehingga terjadi kerja sama bersama empat negara yaitu Afghanistan, Pakistan, Iran dan Takjistan. Konflik Amerika Serikat dan Taliban memanas akibat Amerika menyebut bahwa Taliban merupakan komplotan teroris yang tergabung dengan jaringan al-Qaeda. Hingga pada akhirnya terjadi pemusnahan kelompok Taliban yang merupakan bagian dari kelompok radikal. Sedangkan keterlibatan Amerika dengan Afghanistan terjeda akibat kelompok Taliban menguasai Afghanistan. Salah satu juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Glyn Davies menyatakan bahwasanya Amerika Serikat mendukung hal tersebut dengan kepentingan menggalang kekuatan untuk membantu AS dalam program pipanisasi minyak melalui Afghanistan dan Pakistan dari beberapa negara *eks*-Soviet tanpa memedulikan visi Taliban untuk mendirikan negara dengan hukum syariat Islam.

Dari segi Kepolitikan di Afghanistan mulai berubah setelah Amerika Serikat gagal

mendapatkan kesepakatan dan dukungan dari Taliban hingga melakukan beberapa kali pertemuan untuk bernegosiasi dengan Taliban. Amerika Serikat setiap harinya diharuskan untuk mengimpor minyak sebesar 18,8 juta barrel. Namun, hasil dari impor tersebut kurang memuaskan hingga pada akhirnya Taliban dianggap sebagai musuh atas nama kelompok teroris dengan alasan kelompok Taliban kurang demokratis.

Dari segi ekonomi, Amerika Serikat bekerja sama dengan Afghanistan untuk memenuhi pasokan minyak setiap harinya. Namun, hal tersebut berujung penolakan dari pihak Taliban dan Amerika Serikat yang menyatakan perang dengan Taliban. Hanyalah sebuah politisasi agama dalam konflik Afghanistan. Taliban menguasai ekonomi dan mengeksploitasi sumber daya alam di Afghanistan akibat dari adanya pemberlakuan pajak impor ke Afghanistan. Sehingga keuntungan dari pajak tersebut digunakan untuk membeli senjata, amunisi dan bahan bakar untuk perang.

Konflik Taliban di Afghanistan ini juga berpengaruh pada politik Tiongkok, terlebih saat upaya perdamaian yang dilakukan antara Taliban dan Afghanistan. Yaitu terjalinnya persabahatan dan kerja sama antara Tiongkok dan beberapa negara yang terlibat konflik dengan Taliban, yakni Amerika Serikat, Pakistan dan Afghanistan dan memutuskan untuk membentuk *Quadrilateral Coordination Group*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Al-Ghifari Ahda. 'Dinamika Politik Afghanistan pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)'. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta. 2013.
- Adi, Sulistyo. 'Mengenal Afghanistan'. Jurnal Al-Jamiah No. 36. 2008.
- Alemarah, 'Pemerintahan Imarah Islam, Kemakmuran Afghanistan'. Garda Nasional. 2019.
- Aziz, Nasru Alam. 'Mantan Presiden Burhanuddin Rabbani Dibunuh'. Kompas.com. 2011.
- Campbell, Tom. 'Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan'. Terj. F. Budi Hadirman. Yogyakarta: Kanisius. 1994.
- Chouvy, Pierre-Arnaud. 'Opium: Uncovering the Politics of the Poppy. Bloomsbury Publishing. 2009.
- Edwards, David B. 'Before Taliban: Genealogis of the Afghan Jihad'. University of California Press. 2022.
- Fadly, M Ahyar. 'Gerakan Radikalisme Agama; Perspektif Ilmu Sosial'. Jurnal El-Hikam Vol 9.1.

- Gartenstein-Ross, Daveed, Daniel Trombly, and Natganiel Barr. 'China's Post-2014 Role in Afghanistan'. FDD Press. 2014.
- Goodson, Larry P. 'Afghanistan's Endless War'. London: Universitas Washington Press. 2001.
- Haris, Umiyati. 'Penyelesaian Konflik Afghanistan-Pakistan: Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi'. Skripsi: Universitas Hasanuddin. 2016.
- Hong, Zhao. 'China's Afghan Policy: The Forming of The 'March West' Strategy?'. The Journal of East Asian Affairs Vol. 27.2. 2013.
- Jones, Pip. Liz Bradbury and Le Boutillier. '*Pengantar Teori-teori Sosial*'. Terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- Khan, Muhammad. 'China's Economic and Strategic in Afghanistan'. FWU Journal of Social Sciences, Special Issue, Summer 2015, Vol 1.1. 2015.
- Khorrami, Nima. 'Post-US Afghanistan: What Role for The SCO?'. Cabar Asia. 2021.
- Ma'ruf, Ali. 'Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Taliban di Afghanistan (1996-2001)'. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta. 2015.
- Nafisah, Durrotun. 'Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M'. Skripsi: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Nojumi, Neamatollah. 'Afghanistan in the International System. In The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil War, and the Future of the Region'. New York: Palgrave Macmillan. 2002.
- Pramadiba, Istman Musaharun. 'Menlu Amerika Mike Pompeo Sebut Iran Jadi Markas Baru Al Qaeda'. Tempo.com. 2021.
- Weber, Max. 'Sosiologi'. Terj. Noorkholis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- William Malley (ed.). *'Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan'*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1999.

'FIRST MEETING OF QUADRILATERAL COORDINATION GROUP HELD IN
ISLAMBAD'. Pakistan: Arynews. 2016.
'Kembalinya Taliban, Politikk Kawasan dan Laut Cina Selatan'. Medcom.id 2021.
.'Siapakah Kelompok Taliban?'. BBC Indonesia. 2009.